



ISBN : 978-623-98581-1-7

PROSIDING

Seminar Nasional & Call for Paper 2022

Magister Administrasi Publik

Leadership and Public Trust

**Program Studi Magister Administrasi Publik
Pascasarjana
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**



**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER 2022
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

“Leadership and Public Trust”

31 Oktober 2022
Serang, Indonesia



Publisher
Program Studi Magister Administrasi Publik
Pascasarjana
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Copyright © 2022 Belong to the
Writers All rights reserved.

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER 2022
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

“Leadership and Public Trust”

Organizing Committee

Ketua : Dr. Rina Yulianti, S.IP., M.Si
Sekretaris : Dr. Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si
Acara : Mirza Abdi Khairusy, M.M
Publikasi : Tiwi Rizkiyani
Sierfi Rahayu

Steering Committee

Penanggung Jawab : Dr. H. Aan Asphianto, S.Si., SH., MH

Reviewer

Riswanda, Ph.D
Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si

Editor

Dr. Rina Yulianti, S.IP., M.Si
Dr. Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si

PUBLISHER & EDITORIAL STAFF:

Program Studi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Untirta

Kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Pakupatan
Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan Serang Provinsi Banten
e-mail : map.pasca@untirta.ac.id
website : map.pascasarjana.untirta.ac.id

© 2022. All rights reserved

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan dalam menjalani aktivitas keseharian kita semua.

Alhamdulillah kami Panitia Seminar Nasional dan *Call for Paper* "Leadership and Public Trust" yang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2022 telah menyelesaikan penyusunan Buku Prosiding Seminar Nasional dan *Call for Paper*. Prosiding ini berisi tulisan para peserta pemakalah pada *Call for Paper* yang telah melakukan presentasi pada sesi presentasi kelompok pada tanggal 31 Oktober 2022.

Terselesainya penyusunan Buku Prosiding Seminar Nasional dan *Call for Paper* "Leadership and Public Trust" tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama beberapa pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, MT, selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2. Dr. H. Aan Asphianto, S.Si., SH., MH. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
3. Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
4. Dr. Rahmi Winangsih, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5. Iman Mukhroman, S.Sos., M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
6. Drs. Hasuri, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
7. Dr. Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
8. Para Narasumber pada kegiatan Seminar Nasional: Dr. Al Muktabar, M.Sc (PJ Gubernur Banten), Dr. Roni Ekha Putera, S.IP., M.PA (Ketua Prodi MAP Universitas Andalas), Dr. Drs. H. Dudung Ahmad Suganda, M.Si (Praktisi Kebijakan Bidang Perkebunan Provinsi Jawa Barat), Riswanda, Ph.D (Akademisi FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa), dan Prof. Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si (Akademisi FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
9. Para peserta seminar dan pemakalah *Call for Paper* yang berasal dari berbagai perguruan Tinggi
10. Tim IT Pascasarjana

11. Himpunan Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
12. Dan semua pihak yang telah membantu sejak dalam pelaksanaan seminar sampai terselesaikannya penyusunan buku prosiding ini.

Kami selaku panitia menyadari bahwa Buku Prosiding Seminar Nasional dan *Call for Paper* ini jauh dari kata sempurna, kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan. Kami juga mohon maaf jika dalam proses awal sampai akhir masih banyak kekurangan dari panitia.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis dan pembaca juga menjadi bahan referensi serta masukan bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

Serang, 31 Oktober 2022

Ketua Panitia

Dr. Rina Yulianti, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
Birokrasi, Era Disrupsi, Revolusi Industri 4.0 Dan Generasi Z (Studi Kasus Manajemen Pengelolaan Badan Layanan Umum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten) Kandung Sapto Nugroho.....	1-10
Analisis Bibliometrik Kepemimpinan Transformasional dalam Mewujudkan <i>Good University Governance</i> Rahmawati Allyreza.....	11-20
Karakteristik Lingkungan Kebijakan Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kota Serang Listyaningsih, Ismanto.....	21-31
Revitalisasi Dalam Strategi Penentuan Fokus Riset RIRN Dan PRN Hariyanto, Anteng Setia Ningsih, Fathoni Moehtadi	32-40
Strategi Pelayanan Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Serang Dalam Pemenuhan Kebutuhan Darah Awan Dharmawan, Ipah Ema Jumiati.....	41-53
Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Desa Di Kantor Desa Pagelaran Desa Malingping Ucu Husna, Ira	54-61
Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Kepulauan Seribu Juliannes Cadith, Maulana Yusuf.....	62-72
Analisis Program Digitalisasi Menuju Tingkat Adopsi Teknologi UKM Dian Purwanti, Erry Nugroho Himawan, Iman Hilman	73-83
Implementasi Program Layanan Transportasi Angkot Si Benteng Di Kota Tangerang (Studi Kasus Trayek Bulakan-Tiptop Taman Cibodas) Yemima Panglipringtyas, Titi Stiawati, Leo Agustino	84-92
Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Tangerang Hesti Intan Putri, Farashaty Annur	93-102

Kualitas Pelayanan Kesehatan Di RSUD Kota Serang Pada Era New Normal	
Tiwi Rizkiyani.....	103-112
Pelayanan Publik Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Berkah Cabang Labuan	
Elly Nurlia, Muhamad Allam Damara	113-122
Kendala Digitalisasi Kebijakan Pada Program Bela Pengadaan Pemerintah Daerah Provinsi Banten : Studi Kasus Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)	
Ivo Nurul Khotimatunisa, Ade Mulyani.....	123-128
Pengelolaan Dana Desa Di Desa Labuan Kecamatan Mancak Kabupaten Serang	
Erin Yulinar, Yeni Widyastuti, Tti Stiawati	129-139
Inovasi Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang	
Nikki Prafitri	140-150
Inovasi Pelayanan Publik Dalam Penataan Ruang (Studi Kasus SIMTARU DPUPR Kota Serang)	
Ardian Havidani, Ios Sopandi, Angga Rosidin.....	151-163
Kepemimpinan Yang Agile Dalam Digital Governance Di Indonesia Super APPS	
Dr Ayuning Budiati SIP MPPM	164-169
E-Leadership : Konsep Dan Pengaruh Kepemimpinan Digital Dalam Transformasi Digital Di Sektor Pemerintahan	
Sigit Purwoko, Ali Rokhman, Tobirin	170-181
Implementasi Kebijakan Digitalisasi Di Pemerintah Daerah “Penerapan Aplikasi SYANTIKA (Sistem Layanan Administrasi Kepegawaian) Di Kabupaten Purbalingga	
Ardian Sulistiyo, Ali Rohman, Tobirin.....	182-188
Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat	
Ranjani, Suryoto, Andri Trianfano, Sartono, Alfriansa Agustina	189-194
Kepemimpinan Ideal Di Sektor Pelayanan Publik Pada Era Digital	
Muchsinin.....	195-204
Analisis Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Terhadap Percepatan Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Serang	
Nadifi Silviana Pramesti, Dewi Amalia Rahman.....	205-210

Analisis Kemandirian Daerah Di Provinsi Banten	
Arenawati, Pramudi Harsono	211-219
<i>E-Leadership</i> : Tantangan Baru Kepemimpinan Pemerintah Daerah	
Moh. Makbul, Dr. Ali Rokhman	220-227
Intensifikasi Pajak Daerah Di Kota Serang	
Sierfi Rahayu	228-235
Implementasi E-Government Peningkatan Kualitas Layanan SAMSAT Digital Pelayanan Publik Kota Serang	
Afif Fikri Wafiq	236-244
Peran Kebijakan JAMSOSRATU dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Banten	
Gelap Mochammad Erlangga	245-257
Kebijakan Publik : Peran Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Gedung Kelurahan Guna Menunjang Pelayanan Publik di Kota Serang Tahun 2022	
Windy Jadmiko, Rifka Dewi	258-263
Keseimbangan Kehidupan Kerja dan Bekerja Dari Mana Saja dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Study Leteratur)	
Sukarta Atmaja, Mirza Abdi Khairusy, Linardita Ferial.....	264-273
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Taban Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang	
Iwan Kurniawan, Rina Yulianti, Riny Handayani.....	274-284



PROSIDING

Seminar Nasional & Call for Paper 2022

Magister Administrasi Publik

Leadership and Public Trust

ISBN : 978-623-98581-1-7

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DIGITALISASI DI PEMERINTAH DAERAH "PENERAPAN APLIKASI SYANTIKA (SISTEM LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN) DI KABUPATEN PURBALINGGA"

IMPLEMENTATION OF DIGITALIZATION POLICY IN LOCAL GOVERNMENTS "APPLICATION OF THE SYANTIKA APPLICATION (EMPLOYMENT ADMINISTRATION SERVICE SYSTEM) IN PURBALINGGA DISTRICT"

Ardian Sulistiyo, Ali Rohman, Tobirin

Magister Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman

Kata kunci

Pemerintah Daerah, Teknologi, Syantika, E-government, Kedisiplinan, Kinerja

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang luar biasa cepat dan semakin mudahnya informasi untuk diakses menuntut sebuah instansi pemerintahan untuk semakin berbenah dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Sistem Layanan Administrasi Kepegawaian (SYANTIKA) adalah suatu sistem yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga, guna mendukung sistem informasi pegawai negeri sipil yang terintegrasi sehingga mempermudah pegawai negeri sipil dalam hal administrasi kepegawaian, menjadikan pegawai negeri sipi agar lebih disiplin dan juga untuk mewujudkan E-Government di Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dalam hal ini tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana efektifitas dan dampak dari penerapan aplikasi sistem layanan kepegawaian (SYANTIKA), terutama dalam hal kedisiplinan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil. Karena sebelum adanya penerapan aplikasi sistem layanan kepegawaian (SYANTIKA) Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih menggunakan fingerprint dalam hal presensi, dan cara tersebut di nilai kurang efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penggunaan aplikasi system layanan administrasi (SYANTIKA) ini cukup efektif dalam hal meningkatkan kedisiplinan dan kinerja dari pegawai negeri sipil itu sendiri,. Tetapi dalam hal ini masih banyak kekurangan yang ada di dalam aplikasi tersebut sehingga harus adanya penyempurnaan.

Keyword

Local Government, Technology, Syantika, E-government, Discipline, Performance.

ABSTRACT

The rapid development of technology and the increasingly easy access of information requires a government agency to further improve by utilizing this technology. The Civil Service Administration Service System (SYANTIKA) is a system developed by the government of Purbalingga Regency, in order to support an integrated civil servant information system so as to facilitate civil servants in terms of personnel administration, make civil servants more disciplined and also to realize E-Government in the Purbalingga Regency Government. In this case, the purpose of this research is to find out the effectiveness and impact of the application of the civil service system application (SYANTIKA), especially in terms of discipline and performance of Civil Servants. Because before the application of the personnel service system

(SYANTIKA) the Purbalingga Regency Government still used fingerprints in terms of attendance, and this method was considered less effective. This study uses descriptive qualitative research methods. The results of the study indicate that the application of the policy on the use of the administrative service system application (SYANTIKA) is quite effective in terms of improving the discipline and performance of the civil servants themselves. But in this case there are still many shortcomings in the application so that improvements must be made.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada saat ini menuntut pemerintah daerah untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tersebut, yang mana perkembangan teknologi tidak bisa dihindari karena teknologi ini akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pemanfaatan teknologi yang dilakukan pemerintah daerah dengan baik mempunyai tujuan untuk mempermudah pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat ataupun kepada pegawai pemerintah itu sendiri (E-Government).

Sebagai mana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 58, dan untuk meningkatkan kedisiplinan, motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengeluarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagaimana dijelaskan pada pasal I bahwa tambahan penghasilan pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pegawai aparatur sipil negara (ASN) sebagai bentuk penghargaan atas kinerja pegawai ASN. Salah satu tujuan dari Pemberian tambahan penghasilan pegawai yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan public, meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kedisiplinan, dan kesejahteraan pegawai. Dalam hal ini tata cara pemberian dan penghitungan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja setiap bulannya dengan rumusan penilaian produktivitas kerja bulanan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima oleh pegawai aparatur sipil negara dan penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima oleh pegawai aparatur sipil negara

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga membuat sebuah inovasi yang di sebut dengan Sistem Layanan Administrasi Kepegawaian (SYANTIKA), dalam sistem ini terdapat beberapa layanan kepegawaian diantaranya *e-presensi* dan *e-kinerja*. Sistem ini mulai berlaku pada awal tahun 2022 yang di terapkan kepada pegawai aparatur sipil negara (ASN) di 6 (enam) organisasi perangkat daerah *semple*, dan kemudian mulai diterapkan kepada seluruh pegawai aparatur sipil negara (ASN) organisasi perangkat daerah pada bulan

mei 2022. Dalam hal ini tidak semudah yang diharapkan, terdapat beberapa permasalahan yang ditemui sejalan dengan diberlakukannya aplikasi Syantika hampir di semua organisasi perangkat daerah, salah satunya yaitu terkait sumber daya manusia (SDM) yang tidak semuanya berusia muda dan paham teknologi dan juga aplikasi yang belum stabil (masih sering eror). Dari hal tersebut penulis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan dampak dari diterapkannya aplikasi Syantika tersebut di Kabupaten Purbalingga.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam wahab, 2008:65) yang di sebut dengan implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam hal ini suatu kebijakan harus diimplementasikan dengan sebaik mungkin guna mencapai suatu tujuan yang sudah di tetapkan.

Menurut friedrich (dalam wahab 2008:3) yang dimaksud dengan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Dalam hal ini kebijakan menjadi sebuah sarana untuk menyelesaikan masalah atau hambatan-hambatan dari sebuah tujuan yang sudah ditetapkan bersama oleh individu, kelompok ataupun pemerintah. Oleh karena itu pentingn bagi seseorang pengambil kebijakan untuk bisa mengerti akar suatu masalah dengan cara menganalisisnya sehingga bisa menemukan suatu kebijakan yang baik.

Menurut Wahab (Tahir, 2014:55) mendefinisikan Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badab peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/ mengatur proses implementasinya. Dalam hal ini implementasi kebijakan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin guna mencapai tujuan/maksud yang sudah di tuangkan dalam suatu kebijakan tersebut.

Menurut Moeheriono (2012:95) kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi. Dalam hal ini untuk mewujudkan kinerja yang baik maka SDM harus mempunyai kompetensi yang unggul dan mempunyai semangat juang yang tinggi.

Menurut Putri (2014) E-Kinerja adalah salah satu aplikasi berbasis web untuk menganalisi kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan dan beban kerja unit atau satuan kerja organisasi sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian insentif kerja. dengan perkembangan

zaman yang super cepat ini harus di manfaatkan dengan sebaik mungkin guna meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

E-Presensi adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola presensi ASN sekaligus menghitung Tambahan perbaikan penghasilan yang di peroleh ASN. Sedangkan menurut Tarry Andini, (2019) presensi online adalah pencatatan kehadiran yang memanfaatkan teknologi modern dengan menggunakan system cloud yang terhubung dengan database secara realtime dimana system cloud tersebut menyimpan data secara otomatis yang kemudian data tersebut secara otomatis bisa diakses dimana saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Dalam hal ini pemanfaatan teknologi memang sangat penting dilakukan oleh instansi pemerintahan, guna meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

II. METODE PENELITIAN

Menurut sugiono (2011) langkah penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud untuk mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau jawaban atas masalah yang sedang diteliti, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, dalam penelitian ini akan mengkaji tentang penerapan aplikasi Syantika di Kabupaten Purbalingga. Sesuai dengan focus penelitian maka dalam hal ini penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

III. HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan mengenai penerapan aplikasi Syantika di Kabupaten Purbalingga, dengan sudut pandang dari teory implementasi kebijakan public yang telah disampaikan oleh George Erward III dalam buku Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori Proses, dan studi kasus komperatif (Edisi 2016) dengan merujuk pada 4 (empat) variable yaitu :

1. Komunikasi

Menurut Agostiono (2010) Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan dan kejelasan ukuran tujuan kebijakan, dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana kebijakan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Badan Kepegawaian dan juga Dinas Komunikasi dan Informatika sudah melaksanakan komunikasi kepada seluruh pegawai aparatur sipil negara (ASN) terkait tata cara penggunaan aplikasi Syantika. Komunikasi ini dilakukan dengan pemberian sosialisasi secara langsung kepada perwakilan tiap-tiap OPD, selain itu juga sosialisasi dengan pembuatan video tutorial penggunaan Aplikasi tersebut dan juga komunikasi melalui telephone. Dalam hal ini komunikasi tidak selalu berjalan dengan baik karena yang dikomunikasikan adalah hal yang baru dan dengan tingkat pemahaman setiap

aparatur sipil negara yang berbeda-beda, hal ini bukan hanya aparatue sipil negara yang menerima sosialisasi bahkan pematieripun terkadang merasa kesulitan ketika ada aparatur sipil negara yang menyanyakan terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi syantika tersebut. Selain itu masalah komunikasi terjadi ketika perwakilan dari setiap OPD tersebut yang sudah mendapatkan materi dari narasumber dan kemudian ketika meneruskan informasi tersebut kepada aparatur sipil negara di OPDnya masing-masing kurang jelas, sehingga terjadi komunikasi yang kurang baik.

2. Sumber daya

Menurut Agostiono (2010) menuliskan bukan suatu masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim, jika personil yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya, komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program , adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sesuai dengan yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan srana dan prasarana. Dalam hal ini sumber daya yang handal sangatlah dibutuhkan untuk mencapai sutua tujuan yang sduah di tetapkan

Mengenai sumber daya yang ada di Pemerintah Kabupaten Purbalingga khususnya dalam rangka penerapan aplikasi Syantika sangatlah beraneka ragam, dari segi usia, pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki, dalam hal ini banyak dari pegawai aparatur sipil negara yang kurang pahan tentang teknologi dan komunikasi serta ada beberapa pegawai aparatur sipil negara yang sudah mendekati masa pensiun yang menyebabkan penerapan aplikasi syantika belum bisa berjalan dengan baik. selain itu karena aplikasi syantika ini merupakan sistem yang benar-benar baru di Kabupaten Purbalingga. Di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur diantaranya e-presensi dan e-kinerja, yang mana dalam penggunaan e-presensi ini menggunakan hp android dengan spesifikasi yang sudah di tentukan (tidak semua hp bisa) yang sebelumnya presensi masih menggunakan figher print, dari sini sudah banyak permasalahan-permasalahann yang muncul mulai dengan hp yang tidak sesuai spesifikasi, kurangnya pengetahuan teknologi, sistem yang masih sering trobel (aplikasi belum maksimal) . Kemudian terkait e-kinerja yang di dalamnya harus membuat sasaran kinerja tahunan, perjanjian kinerja bulanan dan kinerja harian, dalam hal ini banyak dari pegawai aparatur sipil negara yang masih bingung dalam pembuatan SKP tahunan yang berjenjang dari pimpinan turun sampai kepada staf, yang kemudian harus di bauat perjanjian kinerja bulanan dan kemudian diturunkan kepada kegiatan harian.

3. Disposisi

Dari segi disposisi pegawai aparatur sipil negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Purbalingga tergolong antusias dalam melaksanakan kebijakan terkait penerapan aplikasi

syantika tersebut, karena dalam hal ini aplikasi syantika digunakan sebagai dasar perhitungan pemberian TPP kepada pegawai aparatur sipil negara (ASN) sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan ketentuan penghitungan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja setiap bulannya dengan rumusan penilaian produktivitas kerja bulanan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima oleh pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima oleh pegawai pegawai aparatur sipil negara (ASN). Dalam hal ini juga terdapat permasalahan yaitu ada beberapa pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang masih bingung dalam hal pengisian e-kinerja sehingga mengalami keterlambatan dalam pengumpulan hasil capaian bulanan, sehingga menyebabkan penundaan pemberian TPP di OPD tersebut. Dengan adanya aplikasi ini juga meningkatkan kinerja dan kedisiplinan pegawai aparatur sipil negara (ASN) secara umum karena dalam aplikasi ini pimpinan bisa secara langsung memonitor kinerja seluruh bawahannya.

4. Struktur organisasi

Dalam Winarno (Winarno, 2015) menurut Edward III terdapat karakteristik utama dalam birokrasi yaitu : Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal ini setiap layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada penerima layanan harus adanya suatu SOP agar mempermudah dan mem[er]jelas proses p[er]layanannya.

Dalam winarno (Winarno, 2015) struktur birokrasi merupakan tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur sehingga aturan yang di kaji jelas dan tepat, struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jalannya implementasi kebijakan. Selain itu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standar oprasional prosedur (SOP), standar oprasional prosedur (SOP) merupakan alur atau panduan untuk menjalankan suatu aplikasi atau program, sehingga program dapat berjalan sesuai perintah. Standar Oprasional Prosedur (SOP) juga dapat menjadi pedoman bagi pihak implementor atau sasaran implementasi yang telah ditetapkan terutama dalam mengambil keputusan serta tindakan yang akan dijalankan. Dalam hal ini struktur organisasi yang dibuat harus sesuai dengan aturan dan kebutuhan.

Dalam penerapan aplikasi syantika ini terdapat server pusat untuk menampung database pegawai aparatur sipil negara (ASN) serta input dan output program yang dijalankan. Dengan adanya server yang mendukung tentu saja sangat berpengaruh dalam penerapan aplikasi Syantika tersebut, permasalahan server yang terkadang lambat dan eror terutama ketika penggunaan aplikasi e-presensi. Selain itu permasalahan lain yang cukup serius adalah belum adanya ruangan khusus untuk server, yang sementara ini masih menumpang di gedung setda yang mana saklarnya masih jadi satu, ketika ada orang yang tidak sengaja ataupun sengaja mematikan saklar yang ada di setda maka server pusatnya pun akan ikut mati, ini yang menjadi salah satu penyebab server menjadi eror.

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan terkait penerapan aplikasi Syantika di Kabupaten Purbalingga cukup efektif dalam hal meningkatkan kinerja dan kedisiplinan pegawai aparatur sipil negara (ASN). Karena aplikasi ini juga belum lama di terapkan maka masih banyak hal-hal yang harus disempurnakan kembali, agar dalam penggunaannya bisa lebih mudah dan maksimal. Selain itu juga harus adanya monitoring dan evaluasi atas keberlangsungan program ini secara rutin agar bisa mengetahui kekurangan-kekurangan lain dari aplikasi Syantika tersebut.

REFERENSI

- Agostiono. (2010). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn (Agostiono (ed.)). Rajawali.
- Putri, K. E., Arfan, M., & Basri, H. (2014). Pengaruh penerapan e-kinerja dan penghargaan (reward) terhadap kinerja aparatur pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan kota banda aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(4).
- Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin, 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*, hlm.135.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sugiyono (ed.)). Alfabeta
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga